

STUDI TENTANG UPAYA UPT. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN DI KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR KECAMATAN MUARA JAWA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Muhammad Fitrah¹

Abstrak

Studi Tentang Upaya UPT. Dinas Kelautan dan Perikanan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kelurahan Muara Jawa Pesisir Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara, dibawah bimbingan Bapak Dr. Anwar Alaydrus, S.Sos, MM sebagai Pembimbing I dan Bapak Eddy Iskandar, S.Sos. M, Si sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Upaya UPT. Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Kelurahan Muara Jawa Pesisir Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara dan Hambatan-hambatan upaya UPT. Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Kelurahan Muara Jawa Pesisir Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah data model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan Upaya UPT. Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di kelurahan Muara Jawa Pesisir dimana UPT. Dinas Kelautan dan Perikanan memberikan pembinaan kepada masyarakat nelayan. Selain itu, hambatan-hambatan upaya UPT. Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Kelurahan Muara Jawa Pesisir adalah kurangnya jumlah pegawai di kantor UPT. Dinas Kelautan dan Perikanan dan kurangnya fasilitas yang diperlukan sehingga dalam proses pelaksanaan tugasnya tidak berjalan dengan baik dan lancar yang mengakibatkan timbulnya ketidakpuasan masyarakat nelayan di Kelurahan Muara Jawa Pesisir.

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: fitriahmuhammad72@gmail.com

Kata Kunci: *UPT. Dinas Kelautan dan Perikanan, Pemberdayaan Masyarakat Nelayan*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu Negara kepulauan terbesar di dunia dengan melihat perairan lebih besar/lebih luas dari daratan yang ada, sehingga bahwa akan kaya sumber daya alam yang ada di perairan. Ketersediaan sumberdaya alam diwilayah daratan dan daya dukungnya yang semakin terbatas telah mengubah focus perhatian pemerintah kesektor kelautan dan perikanan yang masih memberikan peluang dan harapan dimasa mendatang. Sejalan dengan ini, regulasi tentang pengelolaan perikanan telah di atur dalam UU nomor 31 tahun 2004 yang menegaskan bahwa pengelolaan Sumber daya alam ikan perlu dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan tariff hidup nelayan.

Wilayah Muara Jawa Pesisir perekonomian masyarakatnya rata – rata masih bertumpu pada sector perikanan. Ini membuktikan bahwa salah satu mata pencarian / bidang usaha yang menjadi basis perekonomian masyarakat adalah melakukan penangkapan ikan/nelayan. Dinas Kelautan dan Perikanan Kutai Kartanegara terus melakukan pembenahan diri dari masalah infrastruktur, pembangunan perikanan terus dioptimalkan, dan pemberdayaan masyarakat nelayan, segala aset – aset yang terkait dengan kelautan perikanan terus dikembangkan. Pemberdayaan masyarakat nelayan yang dilakukan oleh UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan Muara Jawa yang diberdayakan adalah masyarakat nelayan Kelurahan Muara Jawa Pesisir.

Permasalahan internal yang menyulitkan usaha – usaha nelayan Muara Jawa Pesisir adalah keterbatasan pendidikan, kurangnya kesempatan untuk mengakses dan menguasai teknologi yang lebih modern, dan tidak memiliki modal yang cukup. . Adapun permasalahan eksternal yang dirasakan para masyarakat nelayan Muara Jawa Pesisir, seperti makin terbatasnya potensi sumber daya laut yang bias di dimanfaatkan, persaingan yang makin insentif, mekanisme pasar, posisi tawar dihadapan tengkulak yang membuat nelayan makin tidak berdaya.

Kerangka Dasar Teori

Pengertian Upaya

Menurut Poerwadarminta (1991:574), “upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtiar. Upaya merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan maksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan”. Upaya sangat berkaitan erat dengan penggunaan sarana prasarana dalam menunjang kegiatan tersebut, agar berhasil maka digunakanlah suatu cara, metode dan alat penunjang yang lain.

Dinas Kelautan dan Perikanan

Dinas Kelautan Dan Perikanan (DKP) Kutai Kartanegara merupakan salah satu saruan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang bertugas untuk melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dokesentrasi di bidang Kelautan dan Perikanan.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No 12/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 12).

Strategi Dan Kebijakan Dinas Kelautan Dan Perikanan

Dengan melihat kondisi dan permasalahan yang dihadapi pada sektor kelautan dan perikanan selama ini, melalui tujuan dan sasaran yang diharapkan maka strategi pembangunan kelautan dan perikanan yang di tempuh adalah :

1. Meningkatkan mutu disiplin, etos kerja dan profesionalisme lembaga serta aparatur dan masyarakat perikanan.
2. Memacu peningkatan produksi dan produktivitas perikanan untuk pemenuhan pangan dalam negeri dan ekspor.
3. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya ikan sebagai sumber makanan yang bergizi bagi kesehatan masyarakat.

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan dalam rangka mengelola dan memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan, meliputi :

1. Mengembangkan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur dan masyarakat kelautan dan perikanan.
2. Memperkuat dan mengembangkan usaha perikanan tangkap secara efisien, lestari dan berbasis kerakyatan.
3. Mengembangkan dan memperkokoh industry penangan dan pengolahan serta pemasaran hasil perikanan.

Upaya UPT. Dinas Kelautan dan Perikanan

Dalam rangka Mencapai tujuan sasaran pembangunan perikanan dan pemberdayaan masyarakat, maka adapun upaya-upaya UPT Dinas Kelautan dan Perikanan Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut :

1. Peningkatan sarana dan prasarana budidaya perikanan untuk.
2. Pengembangan Kapasitas SDM pembudidaya ikan.
3. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.
4. Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan.

Pengertian Pemberdayaan

Menurut Suhendra (2006: 75) pemberdayaan masyarakat dapat diartikan bahwa “masyarakat diberi kuasa dalam upaya untuk menyebar kekuasaan melalui pemberdayaan masyarakat organisasi agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya untuk semua aspek kehidupan politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, pengelolaan lingkungan dan sebagainya”.

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan menurut arti secara bahasa adalah proses, cara, perbuatan membuat berdaya, yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak yang berupa akal, ikhtiar atau upaya (Depdiknas, 2003). Dalam beberapa kajian mengenai pembangunan komunitas, pemberdayaan masyarakat sering dimaknai sebagai upaya untuk memberikan kekuasaan agar suara mereka didengar guna memberikan kontribusi kepada perencanaan dan keputusan yang mempengaruhi komunitasnya.

Menurut Mubarak (2001) pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk memulihkan atau meningkatkan kemampuan suatu komunitas untuk mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawabnya selaku anggota masyarakat.

Masyarakat Nelayan

Nelayan merupakan kelompok masyarakat pesisir yang secara langsung mengusahakan dan memanfaatkan sumberdaya ikan melalui kegiatan penangkapan dan budidaya. Kelompok ini pula mendominasi pemukiman di wilayah pantai pada pulau-pulau besar dan kecil di Indonesia (Nikijulw, 2003). Menurut Kusnadi (2009), Masyarakat nelayan adalah masyarakat yang hidup, tumbuh dan berkembang di kawasan pesisir, yakni suatu kawasan transisi antara wilayah darat dan laut.

Metode Penelitian

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Key Informan yang dipilih adalah Kepala Kantor UPT. Dinas Kelautan dan Perikanan Kecamatan Muara Jawa, dan informan adalah dua Pegawai Kantor UPT. Dinas Kelautan dan Perikanan Kecamatan Muara Jawa dan Masyarakat Nelayan di Kelurahan Muara Jawa Pesisir. Jenis data yang digunakan adalah data yang berbentuk tulisan dan data yang berbentuk tulisan dan data yang berbentuk lisan (kata-kata). Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang berasal dari wawancara terhadap informan dan

sumber data sekunder yang berasal dari dokumen, buku, laporan, dan lain-lain. Adapun teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis dan diinterpretasi melalui reduksi data yang diperoleh, kemudian data dipilah, dan disajikan yang pada akhirnya ditarik kesimpulan atas jawaban-jawaban yang diperoleh dari informan. Kualitas atau keabsahan data menggunakan triangulasi dengan membandingkan hasil wawancara antara informan satu dengan informan lainnya dan juga dengan dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil Penelitian

Upaya UPT. Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kelurahan Muara Jawa Pesisir Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data sebagai berikut, selanjutnya adalah pembahasan dari penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi mengenai Upaya UPT. Dinas Kelautan Dan Perikanan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kelurahan Muara Jawa Pesisir Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara yang meliputi: Peningkatan sarana dan prasarana, Pengembangan kapasitas pembudidaya ikan, Pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan, Peningkatan masyarakat nelayan dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan serta Hambatan-hambatan Upaya UPT. Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di kelurahan Muara Jawa Pesisir Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara.

Peningkatan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana UPT. Dinas Kelautan dan Perikanan Kecamatan Muara Jawa tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan msyarakat nelayan pada umumnya seperti badan kapal, mesin kapal, dan alat tangkap, semua itu kebijakan dari Kabupaten dan Provinsi. Pihak UPT hanya bisa membantu dalam melengkapi berkas-berkas yang diperlukan dalam setiap pengajuan permohonan bantuan dalam bentuk proposal, lebih dari itu, pihak UPT tidak bisa berwenang lebih jauh, karena Kabupaten yang menentukan apakah proposal dapat diterima atau tidak dan apakah layak untuk diberikan bantuan.

Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan

Pengembangan kapasitas SDM pembudidaya ikan tidak jauh berbeda dengan upaya sebelumnya yaitu pembinaan. Namun dalam hal ini, kurangnya bantuan dari Kabupaten UPT. Dinas Kelautan dan perikanan sangat jarang mengadakan pelatihan sehingga sangat ketinggalan jauh masyarakat nelayan untuk mengetahui secara materi, padahal dari UPT. Dinas Kelautan dan perikanan

selalu mengusulkan program tersebut ke Kabupaten tetapi yang menurut Kepala kantor UPT. Dinas Kelautan dan perikanan karena kurangnya anggaran yang ada di Kabupaten tersebut menjadi penghalang atau penghambat untuk setiap kali melakukan program pemberdayaan masyarakat nelayan. Sehingga SDM pembudidaya ikan masih sangat jauh yang diharapkan.

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan

Masyarakat nelayan di wilayah Kelurahan Muara Jawa Pesisir dari segi perekonomian pun masih sangat tidak jelas padahal dari hasil penelitian yang telah dilakukan pendapatan masyarakat nelayan itu tidaklah kecil namun karena adanya ketergantungan dari pengepul tadi pendapatan mereka pun tidak bisa dipastikan.

Nelayan kelurahan Muara Jawa Pesisir masih tetap berada dalam taraf social ekonomi yang sederhana seperti nelayan yang turun ke laut masih mengandalkan alat penangkapan yang masih tradisional. Nelayan tradisional masih mengandalkan perahu dayung, walaupun sudah ada sebagian nelayan yang memiliki perahu atau kapal yang digerakkan dengan mesin temple, tetapi alat tangkap yang digunakan masih berupa pancing, jarring, jala dan pukat. Karena itu hasil yang diperoleh sangat terbatas dan tidak mampu bersaing dengan daerah lain. Selain itu adanya keterbatasan pendidikan, kemampuan dan keterampilan serta teknologi yang dipunyai, membuat mereka kurang mampu menghadapi tantangan alam, karena hasil tangkapan tidak menentu, yang bergantung pada musim dan cuaca.

Kondisi kehidupan ekonomi masyarakat nelayan dengan penghasilan yang tidak menentu dan tidak mampu menghadapi tantangan alam yang buruk dengan peralatan yang sederhana meskipun sudah ada peralatan yang digerak oleh mesin namun semua itu belum mampu membuat masyarakat nelayan masih berada tetap posisi garis kemiskinan secara ekonomi terutama pada buruh nelayan.

Peningkatan Masyarakat Nelayan dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan

Dari pengawasan dan pengendalian, UPT. Dinas Kelautan dan Perikanan telah membuat kelompok pengawasan masyarakat yang disingkat PokWasMas, namun untuk diwilayah kelurahan Muara Jawa Pesisir belum ada, dan dari pihak pun akan segerakan untuk terbentuknya kelompok pengawasan tersebut sehingga pengendalian terhadap sektor kelautan dan dikelola dan dijalankan bersama-sama. Dan sangat penting untuk setiap wilayah memiliki kelompok pengawasan masyarakat tersebut. Masalah yang berkaitan dengan kelautan pun bisa diselesaikan dengan sesuai aturan yang berlaku atau dimusyawarahkan secara baik jika ada masalah yang timbul dan berkaitan dengan PokWasMas, UPT. Dinas Kelautan dan Perikanan dan lingkungan kelautan.

Hambatan-Hambatan Upaya UPT. Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kelurahan Muara Jawa Pesisir Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara

Kurangnya jumlah person yang ada di UPT. Dinas kelautan dan Perikanan yang menjadi faktor utama, minimnya fasilitas dikantor seperti computer sehingga menghambat masyarakat nelayan dalam melengkapi berkas pengajuan proposal mereka, belum adanya anggaran operasional dan masih banyak yang menjadi faktor penghambat UPT. Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pemberdayaan masyarakat nelayan khususnya dikelurahan Muara Jawa Pesisir.

Bantuan-bantuan seperti sarana dan prasarana untuk masyarakat nelayan pun tidak dapat teroptimalisasi dengan sesuai harapan, UPT. Dinas Kelautan dan Perikanan mengharapkan agar semua masyarakat atau kelompok nelayan mendapatkan sarana dan prasarana yang mereka butuhkan, namun tidak semua kelompok bisa mendapatkan karena adanya seleksi berkas proposal dan yang memenuhi persyaratan yang akan mendapatkan, sehingga kadang terjadinya kesenjangan sosial.

Tingkat SDM yang rendah diduga sebagai salah satu acuan dalam pemberdayaan masyarakat nelayan. Dari sebagian besar kelompok masyarakat nelayan kebanyakan dari anggotanya tingkat pendidikan masih minim. Ketergantungan masyarakat nelayan terhadap pengepul ikan dan kurangnya pengawasan dan pengendalian menjadi permasalahan yang harus diselesaikan UPT. Dinas Kelautan dan perikanan maupun Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya UPT. Dinas Kelautan dan Perikanan Kecamatan Muara Jawa menekankan pada upaya diantaranya sarana dan prasana menjadi faktor penting yang harus di upayakan oleh pemerintah agar masyarakat nelayan khususnya di Kelurahan Muara Jawa Pesisir mendapatkan kebutuhan mereka agar dapat menjalankan kehidupan mereka sebagai masyarakat nelayan yang dapat bersaing dengan nelayan di daerah lainnya.
2. Sarana dan prasarana merupakan faktor penting dalam menunjang usaha perikanan para masyarakat nelayan. Sarana dan prasarana merupakan sebuah urat nadi dari berbagai macam kegiatan dan usaha. Minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh para masyarakat nelayan di daerah kelurahan Muara Jawa Pesisir yang masih tertinggal sangat mempengaruhi perkembangan usaha mereka. Pemerintah daerah harus bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk melihat keadaan dan kemudian memberikan bantuan pembangunan sarana dan prasarana penunjang bagi masyarakat nelayan.

3. Pengembangan kapasitas pembudidaya ikan di Kelurahan Muara Jawa Pesisir masih sangat minim sehingga masih jauh pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki oleh para nelayan.
4. Pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan untuk saat ini masyarakat nelayan masih adanya ketergantungan ekonomi terhadap punggawa/pengepul dalam hasil jualan mereka yang tidak menentu.
5. UPT. Dinas Kelautan dan perikanan Kecamatan Muara Jawa hanya sekedar memfasilitasi dalam pembentukan kelompok pengawasan masyarakat (PokWasMas) dimana masyarakat dan UPT. Dinas Kelautan dan Perikanan sama-sama memiliki tanggung jawab dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan.
6. Hambatan dalam pemberdayaan masyarakat nelayan melalui UPT. Dinas Kelautan dan Perikanan Kecamatan Muara Jawa adalah bantuan sarana yang di terima untuk tiap kelompok masyarakat nelayan harus melalui tahapan lolos verifikasi proposal, karena tidak semua kelompok masyarakat nelayan mendapat bantuan sarana, akibatnya sebagian besar kelompok masyarakat nelayan merasa kecewa tidak bisa mengembangkan penghasilannya.
7. Kurangnya jumlah pegawai, tidak adanya anggaran operasional dan minimnya fasilitas menjadi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh UPT. Dinas Kelautan dan Perikanan Kecamatan Muara Jawa.

Saran

Berdasarkan beberapa simpulan dari penulis diatas,maka adapun saan-saran sebagai berikut :

1. UPT. Dinas Kelautan dan Perikanan Kecamatan Muara Jawa sebaiknya menambah jumlah pegawai di kantor agar pelayanan dan pembinaan dapat berjalan efektif dan efisiensi.
2. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara sebaiknya memberikan dukungan penuh terhadap UPT. Dinas Kelautan dan Perikanan Kecamatan Muara Jawa dalam memberikan bantuan material maupun non material agar upaya-upaya yang dilakukan dapat berjalan dengan sesuai harapan.
3. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara sebaiknya membenahi atau memperbaiki setiap prasarana yang ada, dan yang belum ada agar segera dicarikan solusinya.
4. UPT. Dinas Kelautan dan Perikanan sebaiknya melakukan pendataan ulang pada masyarakat nelayan atau kelompok nelayan mana yang nelayan asli dan mana yang bukan, sehingga bantuan-bantuan di masyarakat nelayan asli dapat secara merata.

5. Pengembangan kapasitas SDM pembudidaya ikan menekankan agar keterlibatan masyarakat nelayan lebih aktif dalam setiap pembinaan yang dilakukan oleh UPT. Dinas Kelautan dan Perikanan diluar anggaran mereka.
6. UPT. Dinas Kelautan dan Perikanan Kecamatan Muara Jawa harus lebih aktif dan rutin dalam melakukan pembinaan agar SDM pembudidaya ikan dapat menjadi lebih terarah dalam melakukan pengolahan maupun dalam penghasilan.
7. UPT. Dinas Kelautan dan Perikanan Kecamatan Muara Jawa agar segera membentuk POKWASMAS di Kelurahan Muara Jawa Pesisir, sehingga dalam pengawasan dan pengendalian pada sektor kelautan dapat lebih terjaga akan sumber daya perikanannya.
8. Perlu adanya sosialisasi dari lembaga institusi publik atau pemerintah untuk membantu para nelayan dalam hal permodalan seperti memfasilitator antara nelayan dengan lembaga permodalan baik itu bank, koperasi atau lembaga lain, sehingga para nelayan tidak lagi meminjam bantuan dari non bank seperti pengepul ikan atau punggawa.

Daftar Pustaka

- Adi, Isbandi R. (2003). *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat, dan Intervensi Komunitas*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Aziz Muslim, 2009, *Metodologi Pengembangan Masyarakat*. Bandung Humaniora.
- Hikmat, Harry. 2004. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung. Humaniora.
- Kusnadi. 2006. *Filosofi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*. Bandung. Humaniora.
- Miles, M.B dan Huberman, A.M, 1992. *Analisa Data Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy. J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Nazir, M. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Nikijulw Victor, 2001. *Populasi dan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir serta Strategi Pemberdayaan Mereka Dalam Konteks Pengelolaan Sumberdaya Peisisir Secara Terpadu*. Bogor: IPB Bogor.
- Prijono, S. O. dan Pranarka A.M.W. 1996. *Pemberdayaan (konsep, kebijakan dan implementasi)*. Jakarta. CSIS.
- Poerwadarminta, 1991, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Suhendra, K.2006. *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta. Pustaka Belajar.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung. CV Alfabeta.
- Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung. CV Alfabeta.
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung. CV Alfabeta.

Suryoto Usman. 2004. *Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta. Pustaka Belajar.

Sumber Internet:

<http://dkp.kutaikartanegara.go.id> (diakses 12 April 2016)